

The Theology of Ownership and Social Responsibility: A Response to the Article “The Contribution of the Theology of Ownership and the Function of Wealth According to Luke for Efforts Toward Poverty Alleviation in Indonesia

PENULIS

Sara Elvina

INSTITUSI

Sekolah Tinggi Teologi Bandung

E-MAIL

saraelvinayahuda@gmail.com

HALAMAN

35 - 51

ABSTRACT

This study is a critical response to Vasika Hananti’s article, “Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.” Hananti proposes that the church should understand ownership as a trust from God that must be exercised in solidarity and social justice, as exemplified in the Gospel of Luke and the early Christian community. She argues that the church’s approaches to poverty—such as empowerment, entrepreneurship, and charitable diaconia—remain pragmatic and lack a deep theological foundation. Hananti’s conception of ownership also tends to be idealistic when applied directly to the complex socio-economic context of Indonesia. The aim of this study is not to reject Hananti’s ideas entirely, but to refine the theological foundations needed by the church today through formation and solidarity in the face of structural injustice, so that it can respond to poverty in a relevant and responsible manner. This research will employ qualitative descriptive methods and literature review to critically analyze Hananti’s thought within the context of church ministry in Indonesia.

Keywords: word that describe the research, starting from the general and important, separated by commas (3-5 words).

Teologi Kepemilikan Dan Tanggung Jawab Sosial: Tanggapan Terhadap Artikel “Kontribusi Teologi Kepemilikan Dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”

Sara Elvina

Sekolah Tinggi Teologi Bandung
saraelvinayahuda@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini merupakan tanggapan kritis terhadap tulisan Vasika Hananti berjudul *“Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.”* Hananti mengusulkan bahwa gereja perlu memahami kepemilikan sebagai titipan Allah yang harus difungsikan dalam solidaritas dan keadilan sosial, sebagaimana dicontohkan dalam Injil Lukas dan komunitas Kristen mulamula. Ia menilai pendekatan gereja terhadap kemiskinan seperti pemberdayaan, kewirausahaan, dan diakonia karitatif masih pragmatis serta kurang dasar teologis yang mendalam. Pemikiran Hananti tentang konsep kepemilikan yang cenderung idealistik jika diterapkan secara langsung pada konteks sosial-ekonomi Indonesia yang kompleks. Tujuan penelitian ini bukanlah menolak pemikiran Hananti secara keseluruhan, melainkan untuk menajamkan kembali dasar teologis yang dibutuhkan gereja pada abad ini melalui pembinaan, solidaritas menghadapi ketidakadilan struktural, agar menanggapi kemiskinan dengan cara yang relevan dan bertanggung jawab. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kajian pustaka untuk menganalisis pemikiran Hananti secara kritis dalam konteks pelayanan gereja di Indonesia.

Kata-kata Kunci: theology of ownership, the Gospel of Luke, wealth, poverty, social responsibility

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kenyataan sosial yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 menunjukkan bahwa sekitar 9,36% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.¹ Di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, namun masih ada ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi masih sangat mencolok. Gereja

¹ “Badan Pusat Statistik: *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*, diakses 4 Juli 2025,” <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>.

sebagai komunitas iman tidak dapat bersikap netral atau sekadar memberikan bantuan karitatif dalam menghadapi realitas ini. Gereja terpanggil untuk mengupayakan tanggung jawab sosial yang bertumpu pada nilai-nilai Injil dan kesaksian iman yang otentik.

Selama beberapa dekade terakhir, berbagai pendekatan telah dirumuskan oleh para teolog dan pelayan gereja dalam menjawab tantangan kemiskinan. Di antaranya yang paling menonjol adalah pendekatan pemberdayaan, kewirausahaan, dan diakonia. Pendekatan pemberdayaan menekankan pada upaya mengembangkan kapasitas individu agar mandiri secara ekonomi dan spiritual. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Devence Nyortetma dan rekan-rekan bahwa “pemberdayaan ekonomi jemaat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan harga diri dan memberikan mereka kebebasan untuk memilih.”² Pendekatan kewirausahaan lebih bersifat struktural dan mendorong jemaat untuk menciptakan peluang bisnis sebagai sarana kesejahteraan.

Menurut Ndraha, menjadi salah satu sarana penting untuk membantu mengentaskan kemiskinan.³ Sedangkan diakonia sering dijalankan melalui kegiatan karitatif seperti pembagian sembako, bantuan darurat, atau subsidi pendidikan. Meskipun bentuk-bentuk pelayanan tersebut menunjukkan kepedulian gereja terhadap kebutuhan masyarakat, namun pendekatan-pendekatan ini tidak luput dari kritik. Salah satu kritik dikemukakan oleh Hananti pendekatan pemberdayaan dan kewirausahaan rentan terseret ke dalam semangat kapitalisme dan individualisme. Selain itu, pendekatan diakonia yang terlalu fokus pada bantuan dapat menumbuhkan ketergantungan dan melemahkan tanggung jawab personal. Karena itu, Ia menawakan konsep teologi kepemilikan dan fungsi kekayaan dari Injil Luas, sebagai solusi alternatif.

Injil Lukas menunjukkan suatu pola pikir yang unik mengenai relasi antara manusia, kekayaan, dan Allah. Allah adalah pemilik mutlak dari segala sesuatu, dan manusia hanyalah penatalayan yang bertanggung jawab atas harta yang dipercayakan kepadanya.⁴ Maka, kekayaan bukan dimiliki untuk tujuan pribadi atau akumulasi, melainkan untuk digunakan dalam terang misi Allah, khususnya dalam pelayanan kasih dan keadilan sosial. Selain itu, Hananti mengangkat kisah-kisah seperti perumpamaan bendarha tidak jujur (Luk. 16), perjumpaan Yesus dengan Zakheus (Luk. 19), dan praktik berbagi dalam Kisah Para Rasul 2 dan 4 yang menunjukkan gereja perdana memiliki pemahaman teologis yang kuat terhadap kepemilikan yang bersifat komunal dan fungsional.

Kontribusi Hananti patut diapresiasi karena menegaskan kembali aspek moral dan spiritual dari kekayaan, serta mendesak gereja untuk keluar dari paradigma konsumtif dan *profit-oriented*. Namun demikian, artikel penelitian Hananti juga memunculkan sejumlah pertanyaan penting dari sudut pandang teologis yang lebih luas. Misalnya: Apakah benar bahwa semua metafora tuan-hamba dalam Injil Lukas dimaksudkan untuk membentuk sistem teologi kepemilikan? Apakah praktik komunal dalam Kisah Para Rasul dapat

² Devence Nyortetma dkk., “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Sebagai Aksi Pastoral Gereja,” *HOSPITALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 34-43.

³ Yunelis Ndraha, “Mengembangkan Diakonia Reformatif bagi Orang Miskin di Jemaat Banua Niha Keriso Protestan Siofabanua,” *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 16, , no. 2 (2023): 80-94.

⁴ Vasika Hananti, “Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia,” *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2, no.1 (2021): 40-57

diterapkan dalam konteks gereja modern yang hidup dalam sistem ekonomi kapitalistik? Dan apakah semangat kerja keras dan hidup hemat (ugahari) dalam tradisi Protestan layak disamakan dengan akar dari kapitalisme yang eksploratif?

Penelitian ini merupakan tanggapan teologis terhadap pemikiran Vasika Hananti dalam artikelnya *“Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia,”* yang berfokus pada dua bagian penting “teologi kepemilikan dan tanggung jawab sosial dalam perspektif Injil Lukas. Tujuan penelitian ini bukanlah menolak pemikiran Hananti secara keseluruhan, melainkan untuk menajamkan kembali dasar teologis yang dibutuhkan gereja pada abad ini agar menanggapi kemiskinan dengan cara yang relevan dan bertanggung jawab. Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kajian pustaka untuk menganalisis pemikiran Hananti secara kritis dalam konteks pelayanan gereja di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam wacana teologi sosial Indonesia serta memperkuat peran gereja sebagai agen transformatif yang tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga menghadirkan wujud nyata dari kasih, keadilan, dan tanggung jawab sosial umat Allah di tengah masyarakat.

Analisis Pemikiran Vasika Hananti

Vasika Hananti adalah seorang akademisi teologi yang terafiliasi dengan Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya, Palembang. Hanati dikenal aktif menulis artikel dalam bidang teologi kontekstual, khususnya yang berfokus pada isu sosial-ekonomi dan kehadiran gereja dalam kehidupan masyarakat. Beberapa karyanya yang telah dipublikasikan yaitu “Miskin dan Kaya Dalam Injil Lukas dan Teologi Pembebasan,⁵ Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia,⁶ Tafsir Lukas 18:18-27 dan Al Baqarah (2):267-274 Sebagai Dasar Bersama Kristen-Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.⁷ Salah satu artikelnya yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Hananti berupaya memberikan sumbangsih pemikiran Injil Lukas dalam menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia, dengan mengkritisi pendekatan-pendekatan konvensional yang dianggap tidak memadai atau bahkan bermasalah secara teologis.

Dalam artikelnya, ia membagi pembahasannya dalam tiga bagian: pertama, menyajikan pendekatan pengentasan kemiskinan yang umum dipakai gereja di Indonesia: pemberdayaan, kewirausahaan, dan diakonia; kedua, menunjukkan kelemahan mendasar dari pendekatan pemberdayaan, kewirausahaan, dan diakonia; ketiga, mengajukan pendekatan alternatif berbasis pembacaan teologis terhadap Injil Lukas, khususnya terkait kekayaan dan kepemilikan. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bahwa gereja perlu kembali pada landasan teologi yang lebih kuat dan alkitabiah dalam menanggapi isu

⁵ Vasika Hananti dan Bambang Subandrijo, *Miskin dan Kaya Dalam Injil Lukas dan Teologi Pembebasan 2, Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen 2*, no. 1 (2021), 1-19.

⁶ Vasika Hananti, “Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia,” *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 2*, no. 1 (2021): 40-57.

⁷ Vasika Hananti, “Tafsir Lukas 18:18-27 Dan Al Baqarah [2]:261-274 Sebagai Dasar Bersama Kristen-Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 3*, no. 1 (2022): 53-70, <https://doi.org/10.46974/ms.v3i1.53>.

kemiskinan, bukan semata-mata mengadopsi strategi ekonomi praktis.

Setelah menguraikan struktur artikelnya, “*Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*” Hananti mengemukakan gagasan pemikirannya terkait kemiskinan di Indonesia, serta upaya yang dilakukan gereja dan pemerintah melalui program-program seperti pemberdayaan, kewirausahaan dan diakonia. Sistem pengentasan kemiskinan di Indonesia belum mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini terjadi karena pengentasan yang dilakukan gereja terhadap kaum miskin terlalu sering bergantung pada model-model ekonomi praktis yang diadopsi dari dunia sekuler, dan tanpa dasar teologis yang jelas. Sebagai tanggapan terhadap kelemahan pendekatan konvensional, ia mengusulkan Kitab Lukas sebagai dasar teologis bagi pelayanan yang lebih efektif, pola yang dapat diterapkan untuk membangun sistem pengentasan kemiskinan yang berakar pada nilai-nilai alkitabiah.

Hananti mengkritik tiga pendekatan utama yaitu pemberdayaan, kewirausahaan dan diakonia, yang sering dijadikan acuan pelayanan gereja terkait pengentasan kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan yang banyak digunakan gereja, pada dasarnya bertujuan baik, yaitu meningkatkan kemandirian jemaat atau masyarakat miskin. Namun, pendekatan ini dianggap rentan jatuh dalam semangat kapitalisme. Menurut Hananti bahwa:

“Tujuan dari pemberdayaan ekonomi tentunya adalah untuk meningkatkan perekonomian. Masyarakat didorong untuk meningkatkan perekonomian mereka. Cara ini mendorong masyarakat untuk menjadi kaya. Jika tidak dikendalikan, maka akan jatuh pada bahaya keserakahinan.”⁸

Artinya pemberdayaan terlalu menekankan peningkatan kemampuan individu dapat mendorong individualisme dan penumpukan kekayaan pribadi tanpa pertimbangan sosial. Menurut penulis kritik Hananti memiliki dasar yang kuat, terutama ketika pemberdayaan ditempatkan sepenuhnya dalam kerangka mekanisme pasar. Namun pendekatannya belum memberi ruang bagi bentuk pemberdayaan yang memampukan jemaat atau masyarakat untuk bertumbuh dalam tanggung jawab sosial, bukan sekedar kemampuan ekonomi individu. Sejalan dengan ini, D. Stephen Long menunjukkan bahwa disiplin kerja, produktivitas, dan kemandirian tidak harus identik dengan kapitalisme, nilai-nilai tersebut dapat diarahkan kembali menjadi ekspresi kasih dan pelayanan jika diletakkan dalam kerangka kerajaan Allah. Long menegaskan bahwa:

“I have argued that the market tempts us to view the world in terms of values. It produces a ‘critical frame of mind’ that reduces everything which is good, true and beautiful to a formal value based on usefulness and substitutability, flattening all hierarchies to formal equivalences. In contrast to this the church holds forth the possibility of an infallibly true, good and beautiful presentation of human action, incapable of reduction to the usefulness of its formal value.”⁹

Karena itu, pemberdayaan tidak ditinggalkan, tetapi direformasi agar selaras dengan visi gereja sebagai komunitas yang saling menopang. Selain pemberdayaan, Hananti juga mengkritik pendekatan kewirausahaan. Menurutnya, kewirausahaan secara inheren

⁸ Hananti, *Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, 46.

⁹ D Stephen Long, *Divine Economy: Theology and the Market* (London: Routledge, 2000), 262.

berkaitan dengan logika pasar bebas, sehingga mendorong jemaat untuk fokus pada penciptaan keuntungan. Ia menjelaskan bahwa “sifat kewirausahaan juga dapat menimbulkan kekhawatiran, yakni ambisi penciptaan kekayaan yang terus-menerus hingga menimbulkan sifat ketamakan. Hal ini juga dapat jatuh kepada bahaya kapitalisme.”¹⁰

Pendekatan kewirausahaan, jika tidak dilandasi secara teologis, mudah membawa gereja ke dalam pola pikir kompetitif yang bertentangan dengan nilai-nilai Injil. Menurut penulis pemikiran Hananti mengenai relasi antara kewirausahaan dan kapitalisme cukup masuk akal, tetapi penekanannya terlalu menyederhanakan realitas kewirausahaan dalam konteks gereja. Kewirausahaan tidak sepenuhnya harus dipahami sebagai aktivitas ekonomi pasar bebas, ia dapat menjadi sarana pemberdayaan sosial dan pengembangan kreativitas komunitas bila berpijak pada etika Kristen. Dengan demikian, yang perlu dikoreksi bukan aktivitas usahanya, melainkan motivasi dan orientasinya. Gereja dapat membina model kewirausahaan sosial atau kooperatif yang menolak kompetisi individual dan justru menumbuhkan solidaritas.

Selanjutnya, Hananti mengemukakan kelemahan pendekatan diakonia, ketika diakonia dipraktikkan sebagai kegiatan karitatif semata. Ia menegaskan bahwa diakonia yang tidak disertai pembinaan dan transformasi struktural hanya memperkuat ketergantungan. Ia mengemukakan bahwa “memang ada penilaian yang sedikit negatif terhadap diakonia karitatif, yaitu akan membuat penerima diakonia bersikap responsif, tetap berdiam diri dan hanya mengharapkan bantuan.”¹¹ Analisis ini tepat adanya, karena diakonia tidak boleh hanya menjadi respon sesaat. Dengan demikian, menurut penulis pandangan Hananti menunjukkan kepekaan terhadap bahaya karitas yang tidak membebaskan. Hal ini sejalan dengan banyak teolog sosial yang menekankan bahwa diakonia harus bersifat transformatif, bukan pasif.

Namun, kritik Hananti ini mengabaikan dimensi pastoral dari diakonia karitatif. Diakonia karitatif tetap memiliki fungsi penting terutama dalam situasi krisis yang atau bagi kelompok rentan yang membutuhkan bantuan langsung. Karena itu, yang diperlukan bukan meniadakan karitas, tetapi mengintegrasikannya dengan pembinaan, advokasi, dan pemberdayaan, sehingga pelayanan gereja tidak hanya mencakup bantuan jangka pendek bagi yang membutuhkan, tetapi juga mendorong transformasi jangka panjang.

Hermeneutik terhadap Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan

Sebagai alternatif yang ditawarkan Hananti terhadap pendekatan pemberdayaan, kewirausahaan, dan diakonia. Hananti mengusulkan kerangka teologi kepemilikan dan fungsi kekayaan yang merujuk pada perumpamaan-perumpamaan dalam Injil Lukas (Lukas 12:35-48; 16:1-13; 19:11-27) yang menggambarkan relasi antara tuan dan hamba. Ia melihat pola bahwa narasi ini mencerminkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu dan manusia sebagai penatalayan. Ia menulis bahwa:

“Apa yang dimiliki oleh hamba (budak) adalah bukan miliknya sebab, ia hanya diberikan oleh tuannya. Dalam hal ini terdapat makna teologis bahwa

¹⁰ Hananti, *Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, 48.

¹¹ Hananti, *Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, 2021.

Allah yang digambarkan sebagai tuan (seorang bangsawan dalam perumpamaan sepuluh uang mina) adalah pemilik dari uang tersebut. Jadi dalam hal ini muncul teologi kepemilikan Tuhan.”¹²

Artinya kekayaan bukan kepemilikan pribadi absolut, melainkan pemberian dari Allah secara pribadi kepada manusia manusia, serta mempercayakan kekayaan itu untuk dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Namun secara teologis, pandangan ini perlu dipertimbangkan kembali. Dalam banyak kasus, tokoh “tuan” dalam perumpamaan bukanlah representasi langsung dari Allah, tetapi berfungsi sebagai metafora fungsional yang dipakai dalam mengajar suatu nilai etis atau eskatologis tertentu. Para penafsir seperti Craig Blomberg dan Joel Green menegaskan bahwa struktur tuan-hamba yang muncul dalam perumpamaan mencerminkan realitas sosial pada zaman Yesus, bukan norma teologis tentang relasi Allah dan manusia.

Craig Blomberg menegaskan bahwa “*each parable makes one main point per main character—usually two or three in each case—and these main characters are the most likely elements within the parable to stand for something other than themselves, thus giving the parable its allegorical nature.*”¹³ Artinya setiap perumpamaan hanya memuat satu poin utama untuk tiap tokoh sentral, dan para tokoh itu merepresentasikan sesuatu selain diri mereka sendiri, sehingga tidak boleh artikan sebagai representasi literal dari Allah. Sementara itu, Green menjelaskan bahwa “*The examples on which Jesus draws throughout this portion of his address are predominantly rooted in the lord/slave relationship, the presence of which was felt throughout the Empire.*”¹⁴ Artinya penggunaan tokoh “tuan” dalam perumpamaan Lukas bukan dimaksudkan untuk menggambarkan Allah secara langsung, melainkan karena relasi tuan–budak merupakan ilustrasi sosial yang akrab dalam konteks Kekaisaran Romawi. Tokoh itu berfungsi sebagai contoh retoris, bukan sebagai representasi teologis literal.

Sebaliknya, Kitab Kejadian menyajikan relasi pencipta dengan ciptaan sebagai fondasi untuk memahami kepemilikan. Dalam Kejadian 1-2, Allah mempercayakan bumi kepada manusia untuk “mengusahakan dan memelihara” (bdk. Kej. 2:15), bukan dalam model hierarkis tuan-budak, tetapi dalam relasi persekutuan. Dalam kerangka ini, manusia bukan sekadar pengelola, tetapi mitra Allah dalam karya penciptaan dan pemeliharaan. Walter Brueggemann menegaskan bahwa “*This man and woman are not the chattel and servants of God, but the agents of God to whom much is given and from whom much is expected (cf. Luke 12:48).*”¹⁵ Terence Fretheim juga menunjukkan bahwa relasi Allah dan manusia dalam narasi penciptaan bersifat kooperatif, sebagaimana ia menyatakan bahwa “*God has freely chosen to share the continuing process of creation with the creatures, especially human beings.*”¹⁶ Karena itu, makna teologi kepemilikan perlu dipahami dalam relasi kemitraan antara Allah dan manusia dalam narasi penciptaan.

¹² Hananti, *Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, 49.

¹³ Craig Blomberg, *Interpreting the Parables*, Second edition (IVP Academic, 2012), 190.

¹⁴ Joel B. Green, *The Gospel of Luke*, Repr., The New International Commentary on the New Testament (Grand Rapid: Eerdmans, 1997), 474.

¹⁵ Walter Brueggemann, *Genesis*, Interpretation a Bible Commentary for Teaching and Preaching (Louisville, Ky: Westminister John Knox Press, 2010), 50.

¹⁶ Terence E. Fretheim, *God and World in the Old Testament: A Relational Theology of Creation* (Nashville: Abingdon Press, 2005), 103.

Selanjutnya, gagasan teologi kepemilikan ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap logika kapitalisme yang menekankan kepemilikan pribadi dan akumulasi tanpa batas. Namun, meskipun memiliki dasar biblika yang, konsep itu masih dapat menimbulkan tantangan ketika diterapkan ke dalam konteks social ekonomi Indonesia. Pemikiran ini relevan dan diperlukan sebagai koreksi terhadap mentalitas konsumtif dan individualistik yang berkembang dalam sistem ekonomi modern.

Menurut penulis, teologi kepemilikan yang diajukan Hananti sangat bernilai karena menekankan bahwa kekayaan adalah titipan Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Tetapi penekanan Hananti cenderung menekankan pada aspek moral dan spiritual, sehingga kurang menyentuh dinamika ekonomi yang membentuk sistem kepemilikan di Indonesia. Di samping itu, pertanyaan-pertanyaan penting seperti relasi antara akses ekonomi, dan ketimpangan struktural tidak dibahas. Teologi kepemilikan sangat memberikan kontribusi yang bernilai, namun konsep ini masih perlu pendekatan yang lebih kontekstual, khususnya dalam mempertimbangkan realitas ekonomi, budaya setempat, dan faktor struktural kemiskinan, agar dapat menjawab akar persoalan kemiskinan yang terjadi di lapangan.

Fungsi Kekayaan: Antara Solidaritas Jemaat Mula-Mula dan Konteks Modern

Pola hidup komunitas kristen mula-mula (Kisah Para Rasul 2:4-47; 4:32-35) menunjukkan pesekutuan yang erat dan cara hidup berbagi, juga konsep persamaan dan kesetaraan yaitu semua milik mereka adalah memilik bersama, yang menurutnya mencerminkan sistem ekonomi internal yang menolak individualisme dan kapitalisme. Karena pada konsep milik bersama dipakai untuk kepentingan bersama, hal ini terjadi ketika ada membutuhkan di antara anggota komunitas. Dalam analisisnya, ia menegaskan bahwa:

Persekutuan dalam komunitas jemaat mula-mula ini menggambarkan adanya kepedulian diantara mereka. Persekutuan yang erat membangkitkan kepedulian mereka sampai pada tingkat kebutuhan materi, yang sampai pada akhirnya jalan yang mereka menjual harta milik mereka. Tindakan mereka untuk mengatasi kebutuhan materi ini merupakan cara mereka dalam mengatasi kesenjangan sosial di antara mereka.¹⁷

Hal ini di perkuat oleh penjelasan I. Horward Marshall bahwa: *A distinctive feature was the way in which the believers lived together and practised some kind of joint ownership of possessions. What this means is made clearer in verse 45 where it appears that people sold their possessions so that the proceeds might be used to help the needy.”¹⁸*

Artinya pola hidup jemaat mula-mula bukan hanya menunjukkan kebersamaan secara spiritual, tetapi ada komitmen yang nyata dalam mengelola kekayaan untuk kesejahteraan bersama. Kepemilikan pribadi tidak dianggap hak absolut, melainkan sumber daya yang harus digunakan untuk kepentingan komunitas. Karena itu, tindakan menjual harta merupakan wujud solidaritas yang radikal juga sebagai langkah mengurangi kesenjangan sosial dalam jemaat.

¹⁷ Hananti, *Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, 51.

¹⁸ I. Howard Marshall, *Tyndale New Testament Commentaries: Acts*, 2008 ed., vol. 5 (England: IVP, 2008), 93.

Namun, idealisasinya terhadap jemaat mula-mula perlu dilihat secara kritis. Praktik berbagi dalam Kisah Para Rasul (Kish Para Rasul 2:42-47; 4:32-35) tidak dapat diterapkan secara langsung ke dalam konteks modern yang jauh lebih kompleks. Komunitas Kristen masa kini hidup dalam struktur ekonomi pasar global, bukan seperti pada komunitas tertutup seperti gereja mula-mula. Karen itu, harus wujudkan dalam bentuk-bentuk baru seperti keadilan ekonomi, advokasi kebijakan publik, serta pengembangan sistem ekonomi alternatif yang sesuai konteks.

Hananti juga menekankan tentang fungsi kekayaan bahwa kekayaan harus dipahami dan digunakan secara benar. Berdasarkan kisah Zakheus (Lukas 19:1-10) dan praktik berbagi jemaat mula-mula (Kisah Para Rasul 2 dan 4), ia menegaskan bahwa kekayaan harus dipakai untuk solidaritas, keadilan, dan pemenuhan kebutuhan sesama. Ia menulis bahwa fungsi kekayaan adalah “menekan ketamakan dari orang-orang kaya dan menolong orang-orang yang miskin.”¹⁹ Artinya penggunaan kekayaan yang benar, bertujuan membentuk sikap hidup sederhana dan memberikan pertolongan bagi sesama yang membutuhkan. Pandangan Hananti tentang fungsi kekayaan memberi penekanan penting pada dimensi etis dan komunal harta benda.

Hananti mendasarkan pemikiran ini pada Injil Lukas karena menurutnya, Lukas adalah satu-satunya Injil yang paling konsisten menekankan relasi antara kekayaan dan keselamatan. Dalam Lukas, kekayaan sering kali diposisikan sebagai ancaman spiritual yang menghalangi relasi manusia dengan Allah (Lukas 12:13-21, 18:18-27), tetapi juga dapat menjadi alat untuk melayani sesama jika digunakan dengan bijaksana (Lukas 10:25-37, 19:8). Hananti menjelaskan “Kekayaan atau orang kaya menjadi berada dalam posisi salah di hadapan Allah karena penggunaan harta kekayaannya yang tidak benar. Harta kekayaan hanya digunakan untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri.”²⁰ Artinya seseorang yang memiliki kepemilikan harta tidak salah di hadapan Allah, tetapi terletak pada cara harta itu digunakan. Namun, kekayaan dapat menjadi sarana pelayanan bila dipakai secara benar. Kekayaan yang tidak difungsikan dengan benar, menurutnya, dapat berubah menjadi berhala baru. Karena kekayaan itu tidak bersifat netral, tetapi memiliki daya spiritual yang bisa membelokkan arah hidup manusia jika tidak gunakan dengan benar.

Konsep teologi kepemilikan dan fungsi kekayaan, Hananti menegaskan dalam artikel bahwa :

“Teologi kepemilikan dan fungsi kekayaan secara ringkas mengandung makna bahwa pada hakekatnya pemilik mutlak kekayaan adalah Allah. Allah menganugerahkan kekayaan kepada masing-masing orang. Namun, kekayaan yang dianugerahkan kepada masing-masing orang tersebut juga memiliki dimensi komunal, yang memuwudkan nilai fungsi dari kekayaan.”²¹

Artinya pemilik sejati kekayaan adalah Allah, yang memberi harta kepada setiap orang. Namun, pemberian itu juga memiliki tanggung jawab social, kekayaan yang dimiliki harus digunakan juga untuk orang-orang yang membutuhkan, bukan milik pribadi.

¹⁹ Hananti, *Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, 53.

²⁰ Hananti, *Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, 53.

²¹ Hananti, *Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, 54.

Selanjutnya Hananti menutup pembahasannya dengan peran penting dari teologi kepemilikan dan fungsi kekayaan untuk mengatasi bahaya dari pendekatan-pendekatan kemiskinan seperti pemberdayaan, Kewirausahaan, dan diakonia. Ia mengemukakan bahwa “Teologi kepemilikan dapat berguna untuk menekan keserakahan akibat semangat untuk menjadi kaya. Sedangkan teologi fungsi kekayaan dapat membangun sikap solidaritas antar manusia, sehingga dapat mempergunakan kekayaan untuk kepentingan bersama.”²² Dengan kata lain, teologi kepemilikan dan fungsi kekayaan dalam Lukas bukan sekadar refleksi teologis, tetapi merupakan kerangka sistematis yang harus berakar pada pelayanan gereja. Melalui hal ini, Hananti menatang gereja untuk tidak bergantung pada bantu sepihak yang dilakukan terus-menerus, membina jemaat untuk menjadi penatalayan yang bertanggung jawab serta membentuk komunitas iman yang saling berbagi dan berkeadilan. Dengan demikian, tidak ada lagi jurang pemisah antara miskin dan kaya, yang ada adalah kehidupan komunitas yang saling bahu-membahu.

Teologi Kepemilikan dan Kapitalisme

Hananti mengutip Max Weber dalam artikelnya untuk menunjukkan bahwa semangat ugahari dalam etika protestan telah mendorong semangat kapitalisme yang destruktif. Menurut Hananti, spiritualitas tentang kerja keras, hemat, dan produktif sebagai akar kapitalisme yang menindas. Namun pendekatan ini cenderung tidak proporsional dan mengabaikan perkembangan teologi etika ekonomi Kristen.

Dalam *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* Weber memang menyoroti transformasi etika kerja Kristen khusus asketisme protestan dalam tradisi puritan yang menjadi pendorong pertumbuhan kapitalisme modern. Namun Weber mencatat asal usul etika ini adalah nilai iman dan asketis tentang panggilan sebagai wujud iman. Masalah muncul ketika etika iman berubah menjadi pengejaran keuntungan tanpa batas. Weber menjelaskan:

“In fact, the summum bonum of this ethic, the earning of more and more money, combined with the strict avoidance of all spontaneous enjoyment of life, is above all completely devoid of any eudaemonic, not to say hedonistic, admixture. It is thought of so purely as an end in itself, that from the point of view of the happiness of, or utility to, the single individual, it appears entirely transcendental and absolutely irrational.”²³

Artinya ketika rasionalitas ekonomi murni mengambil alih, kerja bukan lagi ekspresi iman, melainkan tujuan sendiri. Kapitalisme menjadi masalah ketika nilai spiritual terlepas dari iman dan berubah menjadi sistem yang mementingkan akumulasi tanpa batas. Dengan demikian pandangan Hananti yang berpendapat bahwa semangat ugahari mendorong semangat kapitalisme yang menindas tidak sejalan dengan penekanan Weber. Weber justru melihat etika Protestan sebagai ekspresi iman, bukan hanya motivasi ekonomi. Sebaliknya, Weber menekankan bahwa kapitalisme menjadi masalah ketika nilai-nilai rohani kehilangan

²² Hananti, *Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, 55.

²³ Max Weber dan Talcott Parsons, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Reprint, Routledge Classics (Routledge, 2010), 18.

keterkaitannya dengan iman, dan rasionalitas ekonomi murni yang mendominasi menjadi perhitungan tanpa batas. Oleh karena itu, jika Hananti melihat bahaya kapitalisme dari sudut pandang implikasi sosialnya, Weber menunjukkan paradoks etika historis yang berasal dari iman yang pada akhirnya melampaui iman itu sendiri dan melahirkan sistem kapitalisme modern.

Dalam diskursus teologi ekonomi kontemporer, D. Stephen Long menegaskan bahwa gereja harus membangun narasi alternatif yang menjadikan ekonomi sebagai sarana pelayanan, bukan tujuan hidup. Stephen Long dalam tulisannya *“The sources for a Christian economy are the virtues of charity and justice, the practices of baptism, repentance, and reconciliation, the narrative of God’s self-revelation in Jesus, and his continual presence in the life of the church.”*²⁴ Dengan kata lain, gaya hidup ekonomi Kristen harus bertumpu pada praktik hidup bergereja dan etika gereja, bukan pada nilai-nilai kapitalisme yang menempatkan uang sebagai tujuan hidup. Karena ekonomi kristen adalah ekonomi yang dibentuk oleh komunitas, ibadah, dan kebajikan, bukan oleh persaingan dan akumulasi.

Berdasarkan pandangan D. Stpehen Long, masalah utama bukan terletak pada ugahari atau kerja keras itu sendiri, tetapi pada prakti-praktik kerja yang diarahkan pada akumulasi kapitalisme ali-alih, menerapan kasih dalam kehidupan gereja. Jadi ekonomi kristen bukan soal kerja keras atau hidup hemat, tetapi bagaimana umat gereja mengatur hidup mereka dan harta dalam praktik hidup bergereja seperti ibadah, persekutuan, dan pelayanan. Karena itu peran gereja bukan menolak disiplin kerja, melainkan membingkainya kembali dalam narasi kerajaan Allah sehingga penggunaan harta menjadi bentuk partisipasi dalam karya rekonsiliasi dan solidaritas. Dalam hal ini, pendekatan Hananti belum memberi ruang bagi konstruksi spiritualitas ekonomi yang bertumpu pada praktik gerejawi sebagai sumber imajinasi ekonomi alternatif.

Tawaran Pemikiran Altenatif

Pemahaman kepemilikan yang bersifat individual dan legalistik tidak lagi memadai dalam menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi masa kini. Konsep kepemilikan yang dipahami sebagai hak mutlak atas benda atau sumber daya sering kali mengabaikan dampak sosial, ekologis, dan relasional dari cara seseorang menggunakan atau mengakumulasi kekayaan. Dalam konteks dunia modern yang ditandai oleh globalisasi ekonomi, konsumerisme, dan ketimpangan pendapatan yang semakin tajam, gereja memerlukan kerangka teologis alternatif yang mampu menghubungkan kepemilikan dengan mandat sosial secara holistik. Sebagai tanggapan konstruktif terhadap artikel Hananti, artikel ini mengusulkan suatu model pengembangan teologi kepemilikan yang berwawasan tanggung jawab sosial yang didasarkan pada (Imamat 19:9-10). Dalam kerangka ini, kepemilikan pribadi sebagai sestuatu yang tidak absolut, dipahami sebagai karunia Allah yang menyatu dengan mandat sosial. Dalam masyarakat agraris Israel kuno, pemilik ladang memiliki hak atas hasil panennya, tetapi Imamat 19:9-10 menegaskan bahwa sebagian hasil tersebut harus disisakan bagi orang miskin dan pendatang. Jacob Milgrom menekankan bahwa “hukum pe’ah dan leqet bukan tindakan kedermawanan sukarela, melainkan hukum pemberian yang diwajibkan yang bertujuan melindungi orang miskin dan pendatang dengan membatasi

²⁴ Long, *Divine Economy: Theology and the Market*, 232.

kontrol absolut pemilik tanah.”²⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan tidak dipahami secara absolut, melainkan selalu terkait dengan tanggung jawab etis terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, hak atas harta pribadi dalam Israel kuno sejak awal memiliki dimensi sosial yang melekat.

Perintah untuk tidak menuai habis ladang menekankan dimensi relasional dari kepemilikan. Pemilik tanah tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam jaringan sosial yang saling menopang. Christopher J.H. Wright menegaskan bahwa hukum-lukum panen tersebut adalah bentuk provisi struktural bagi kelompok rentan, karena hak pemilik tanah dibatasi oleh Allah untuk menyediakan akses bagi orang miskin serta kepemilikan tidak pernah menjadi hak mutlak karena tanah adalah milik Allah. Christopher J.H. Wright menegaskan bahwa:

*“But these instructions counteract such an attitude and remind the Israelite landholder that the LORD is the ultimate landlord and reserves the right to insist that all Israelites should ‘eat and be satisfied’. So the needs of the landless poor are upheld by granting them freedom to glean, and insisting that the harvesters ensure plenty of gleanings left to be gathered. Once again, human need is brought to the forefront as a moral priority that relativizes the personal benefits of landownership.”*²⁶ hukum tersebut “relativizes the personal benefits of landownership.”²⁶

Dengan kata lain, kepemilikan tidak bersifat absolut, melainkan sarana pemeliharaan kesejahteraan bersama. Ketika sebagian panen sengaja dibiarkan untuk diakses oleh yang membutuhkan, kepemilikan pribadi berfungsi sebagai sarana solidaritas dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini sejalan dengan model teologi kepemilikan yang diusulkan, yang menekankan bahwa harta seharusnya mendukung pemberdayaan komunitas, bukan hanya akumulasi pribadi.

Secara teologis, Imamat 19:9–10 menegaskan bahwa sumber kepemilikan adalah Allah. Karena harta merupakan karunia ilahi, penggunaannya harus selaras dengan kehendak-Nya, yakni memperhatikan kebutuhan sesama dan memelihara keadilan sosial. Christopher J. H. Wright menegaskan bahwa berbagai ketentuan mengenai panen termasuk sisa ladang, persepuhan, dan hak memungut bagi yang miskin harus dipahami bahwa Allah adalah sejatinya pemilik tanah itu, sehingga manusia hanya dapat memiliki tanah secara relatif dan wajib mengakui tuntutan etis dari pemilik sejatinya.²⁷ Dengan perspektif ini, kepemilikan dipahami sebagai alat pelayanan dan tanggung jawab moral. Ayat ini menjadi dasar kuat bagi teologi kepemilikan yang berwawasan tanggung jawab sosial, yang memadukan kepemilikan pribadi, dimensi publik, dan solidaritas komunitas dalam praktik etis yang nyata. Demikian, semua bentuk kepemilikan pribadi memiliki dimensi publik yang tidak dapat diabaikan. Kepemilikan bukan hanya soal otoritas, tetapi juga soal keterlibatan dalam relasi yang saling menopang. Teologi kepemilikan yang mewujudkan tanggung jawab sosial menuntut beberapa aspek pokok:

- **Penatalayanan (Stewardship) yang Berorientasi Publik.** Penatalayanan bukan

²⁵ Jacob Milgrom, Jacob Milgrom, *Leviticus. 2: 17 - 22*, 1. ed, Anchor Bible 3A (Doubleday, 2000), 1629.

²⁶ Christopher J. H. Wright, *Old Testament Ethics for the People of God* (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2004), 313.

²⁷ Wright, *Old Testament Ethics for the People of God*, 84.

sekadar mengelola harta secara pribadi, tetapi menyadari bahwa kekayaan adalah titipan Allah yang membawa konsekuensi publik. Setiap penggunaan harta, baik dalam investasi, konsumsi, maupun distribusi, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Penatalayanan berarti menggunakan sumber daya untuk kebaikan bersama, bukan kepentingan diri.

- **Keadilan Sosial sebagai Prinsip Teologis.** Keadilan dalam Alkitab bukan hanya tentang pemerataan, tetapi tentang pemulihan relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan ciptaan. Keadilan sosial dalam teologi kepemilikan berarti memastikan bahwa penggunaan kekayaan memperbaiki ketimpangan, bukan memperparahnya. Gereja harus berperan sebagai suara profetis yang menyerukan pemberantasan struktur ekonomi yang eksploratif, mendorong transparansi, dan memastikan sumber daya tersedia secara adil bagi semua pihak.
- **Pemberdayaan Komunitas sebagai Model Penggunaan Kekayaan.** Teologi kepemilikan harus melahirkan praktik ekonomi yang memperkuat jemaat. Ini dapat diwujudkan melalui bentuk-bentuk konkret seperti koperasi gereja, program pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro, dana solidaritas, atau inisiatif pemberdayaan ekonomi yang mencerminkan keteladanan jemaat mula-mula. Pemberdayaan memberikan kesempatan bagi jemaat untuk keluar dari kemiskinan struktural dengan cara yang bermartabat.

Pemahaman ini menjadikan teologi kepemilikan tidak berhenti pada aspek moral individual, tetapi bergerak pada transformasi komunitas dan struktur sosial. Gereja dipanggil bukan hanya untuk mengajar jemaat tentang hidup hemat atau murah hati, tetapi untuk menghadirkan ekosistem ekonomi alternatif yang mempraktikkan nilai Kerajaan Allah: kebaikan bersama, kesetaraan, dan solidaritas.

Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa kekayaan jasmani bersifat netral, yakni tidak jahat dan tidak baik tergantung di tangan siapa dan digunakan untuk apa.”²⁸ Oleh karena itu, arah etika penggunaan kekayaan sangat ditentukan oleh spiritualitas dan tujuan sosialnya. “Kekayaan dapat menjadi penghalang, namun juga bisa menjadi pendorong seseorang untuk hidup dalam kebenaran bergantung pada respons batiniah terhadap kekayaan itu sendiri.”²⁹ Gereja dipanggil untuk mendampingi umat agar mampu menempatkan kekayaan dalam terang Injil dan bukan sebagai tujuan akhir. Dalam praktiknya, gereja perlu membangun sistem pendidikan ekonomi etis, komunitas solidaritas berbagi, dan advokasi struktural terhadap kebijakan ekonomi yang timpang. Konteks Indonesia yang beragam menuntut gereja untuk menyesuaikan bentuk tanggung jawab sosial secara kreatif, fleksibel, dan kontekstual. Alih-alih menekankan model tertentu seperti komunalisme, gereja dapat membentuk model hibrida antara kepemilikan pribadi yang bertanggung jawab dan keterlibatan sosial yang aktif.

Kontribusi Vasika Hananti patut diapresiasi karena berani membuka ruang diskusi yang jarang disentuh dalam teologi Indonesia: hubungan antara harta, kepemilikan, dan misi gereja. Namun, pendekatan Hananti masih perlu ditajamkan dengan refleksi hermeneutik yang lebih jeli, keterbukaan terhadap konteks sosial yang kompleks, dan kesadaran atas keragaman spiritualitas ekonomi dalam sejarah gereja. Tanggung jawab sosial gereja tidak

²⁸ Deky Nofa Aliyanto, “Pengajaran Tuhan Yesus Tentang Konsep Kekayaan Dalam Injil Lukas,” *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta* 3, no. 2 (2022): 20–35, <https://doi.org/10.37731/log.v3i2.81>.

²⁹ Aliyanto, “Pengajaran Tuhan Yesus Tentang Konsep Kekayaan Dalam Injil Lukas.” 30.

dapat dibangun hanya melalui struktur kekayaan, tetapi harus lahir dari spiritualitas yang menyatu dengan kehidupan komunitas. Sebagaimana dicatat Aliyanto, Tuhan Yesus “memerintahkan bahwa menjadi kaya secara rohani mutlak dan harus diutamakan lebih daripada menjadi kaya secara jasmani.³⁰ Dalam terang kasih Kristus, kekayaan menjadi sarana partisipasi dalam karya penyelamatan Allah bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk keadilan, kepercayaan, dan pengharapan.

Aplikasi

Penerapan teologi kepemilikan dan fungsi kekayaan dalam pelayanan gereja menuntut keberanian untuk bertransformasi secara teologis dan praksis. Dalam konteks Indonesia yang plural, dengan ketimpangan sosial yang lebar dan realitas jemaat yang beragam, tanggung jawab sosial gereja tidak bisa dihadirkan secara seragam. Ia harus membumi dalam konteks lokal, memperhatikan keterbatasan sumber daya, serta disusun secara bertahap namun strategis.

Gereja Membangun Kesadaran Kepemilikan dan Tanggung Jawab Sosial

Gereja perlu mulai membangun kesadaran teologis jemaat mengenai kekayaan adalah kepercayaan yang dianugerahkan Allah, karena itu, tanggung jawab sosial menjadi hal yang harus dilakukan tiap-tiap orang yang diberi. Banyak warga jemaat yang hidup di antara tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan pemahaman yang keliru tentang berkat sebagai tanda kesalehan. Dalam situasi ini, pengajaran dan pembinaan iman harus diarahkan untuk menyadarkan bahwa kepemilikan terhadap harta bukan hanya soal hak, tetapi juga soal tanggung jawab sosial harus dilakukan. Dalam hal ini Gereja dapat menyelenggarakan seri kotbah, diskusi teologi ekonomi, atau kelas pembinaan jemaat yang membahas kekayaan sebagai anugerah Allah yang menyatu dengan tanggung jawab sosial dan penatalayanan yang setia. Materi ini harus disampaikan secara kontekstual dan tidak menghakimi, agar tidak menimbulkan perasaan bersalah yang kontrapunktif.

Gereja Mendorong Mendorong Solidaritas Ekonomi Dan Keadilan Relasional

Gereja dapat mengembangkan komunitas praktik yang dapat mendorong solidaritas ekonomi dan keadilan relasional. Misalnya, di jemaat urban, gereja bisa memfasilitasi koperasi gereja atau sistem tabungan bersama (usaha bersama) untuk kebutuhan darurat, pendidikan, atau usaha mikro. Di gereja pedesaan, pelayanan dapat diarahkan pada program pertanian kolektif atau distribusi hasil panen secara adil. Praktik seperti ini bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual, karena memperlihatkan bahwa kekayaan digunakan untuk mempererat tubuh Kristus dan menjawab kebutuhan sesama. Di tingkat internal, gereja perlu memastikan tata kelola pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Melalui hal ini gereja tidak hanya hadir, tetapi juga terlibat aktif dalam transformasi masyarakat yang adil.

³⁰ Aliyanto, “Pengajaran Tuhan Yesus Tentang Konsep Kekayaan Dalam Injil Lukas,”31.

Gereja Membangun Kolaborasi Secara Ekumenis dan Lintas Sektor

Gereja perlu membangun hubungan dengan berbagai denominasi gereja dan Lintas sektor pemerintahan negara dalam memperjuangkan keadilan. Banyak gereja lokal merasa tidak berdaya menghadapi ketimpangan struktural seperti eksplorasi pekerja, penggusuran warga, atau kerusakan lingkungan. Namun melalui kerja sama dengan gereja-gereja lain, lembaga advokasi Kristen, dan organisasi masyarakat sipil, gereja dapat berperan sebagai suara kenabian di ruang publik. Dalam membangun kolaborasi, gereja perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik atau kepentingan tertentu. Gereja harus menjaga integritasnya dan menempatkan nilai-nilai Firman Alla sebagai dasar dari keadilan yang disuarakan.

Melalui bentuk-bentuk penerapan, gereja diharapkan tidak hanya mengajarkan teologi kepemilikan yang berwawasan tanggung jawab sosial, tetapi juga menghadirkannya dalam praktik yang nyata dan transformasi sosial. Dengan demikian, upaya yang dilakukan secara kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama akan menolong jemaat memandang kekayaan sebagai sarana pelayanan, bukan tujuan hidup. Gereja menjadi agen kasih dan keadilan Allah yang nyata di tengah masyarakat untuk saling menopang dan menghadirkan nilai Kerajaan Allah.

KESIMPULAN

Analisis terhadap artikel Vasika Hananti memberikan kontribusi penting dalam mengangkat kembali isu teologi kepemilikan dan fungsi kekayaan menurut Injil Lukas sebagai dasar bagi tanggung jawab sosial gereja di tengah kemiskinan yang masih mengakar di Indonesia. Namun, analisis kritis terhadap pendekatan Hermeneutik Hananti memperlihatkan bahwa beberapa penekanannya terutama mengenai perumpamaan Lukas, praktik komunal jemaat mula-mula, dan relasi etika Protestan dengan kapitalismemasih membutuhkan pemaknaan yang lebih hati-hati dan kontekstual.

Teologi kepemilikan tidak cukup dipahami sebagai kontrol moral terhadap kekayaan, tetapi harus dimengerti sebagai partisipasi manusia dalam mandat Allah untuk memelihara, memberdayakan, dan menciptakan keadilan. Karena itu, teologi kepemilikan menuntut dimensi sosial yang kuat mencakup keadilan struktural, solidaritas komunitas, dan pembelaan terhadap kelompok rentan. Gereja tidak dapat lagi membatasi diri pada pola karitatif atau meniru mekanisme pasar, tetapi harus membangun paradigma ekonomi yang berakar pada Injil dan pada kenyataan rakyat kecil.

Dengan demikian, Gereja harus mengembangkan teologi kepemilikan yang bersifat holistic yang berakar pada kemitraan antara manusia dengan Allah, berorientasi pada kesejahteraan bersama, serta relevan dengan konteks Indonesia yang plural dan penuh ketimpangan. Gereja dipanggil untuk ikut serta dalam pembinaan teologis, memperkuat komunitas solidaritas ekonomi, dan terlibat dalam advokasi kebijakan publik sebagai wujud nyata dari iman yang bekerja melalui kasih. Oleh karena itu, kekayaan harus difungsikan menjadi alat dalam menhadirkan keadilan dan kesejahteraan, bukan sarana akumulasi diri, agar gereja benar-benar menjadi kehadiran Allah yang memulihkan dan memperbarui kehidupan masyarakat.

Tanggapan ini tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap pemikiran Hananti, tetapi juga sebagai ajakan bagi gereja untuk membangun fondasi teologis yang lebih utuh bagi pelayanan sosialnya. Teologi kepemilikan tidak sekadar berbicara tentang siapa pemilik kekayaan, melainkan tentang bagaimana umat Allah memfungsikan segala yang dimiliki untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah dunia yang terus diperbarui oleh kasih dan keadilan Kristus

REFERENSI

- Aliyanto, Deky Nofa. "Pengajaran Tuhan Yesus Tentang Konsep Kekayaan Dalam Injil Lukas." *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta* 3, no. 2 (2022): 20–35.
<https://doi.org/10.37731/log.v3i2.81>.
- Blomberg, Craig. *Interpreting the Parables*. Second edition. IVP Academic, 2012.
- Brueggemann, Walter. *Genesis*. Interpretation a Bible Commentary for Teaching and Preaching. Westminister John Knox Press, 2010.
- _____. "Badan Pusat Statistik: *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*, diakses 4 Juli 2025," <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>.
- Fretheim, Terence E. *God and World in the Old Testament: A Relational Theology of Creation*. Abingdon Press, 2005.
- Green, Joel B. *The Gospel of Luke*. Repr. The New International Commentary on the New Testament. Eerdmans, 1997.
- Hananti, Vasika. *Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. 2 (2021).
- Hananti, Vasika. "Tafsir Lukas 18:18-27 Dan Al Baqarah [2]:261-274 Sebagai Dasar Bersama Kristen-Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no. 1 (2022): 53–70.
<https://doi.org/10.46974/ms.v3i1.53>.
- Hananti, Vasika, dan Bambang Subandriyo. *Miskin dan Kaya Dalam Injil Lukas dan Teologi Pembebasan*. 2 (2021).
- Long, D Stephen. *Divine Economy: Theology and the Market*. Routledge, 2000.
- Marshall, I. Howard. *Tyndale New Testament Commentaries: Acts*. 2008 ed. Vol. 5. IVP, 2008.
- Milgrom, Jacob. *Leviticus*. 2: 17 - 22. 1. ed. Anchor Bible 3A. Doubleday, 2000.
- Nyortetma, Devence, Eunike Amping, Meylan Mangintiu, dkk. *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Sebagai Aksi Pastoral Gereja*. t.t.
<https://doi.org/10.70420/5m5xwm61>.
- Weber, Max, dan Talcott Parsons. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Reprint. Routledge Classics. Routledge, 2010.

Wright, Christopher J. H. *Old Testament Ethics for the People of God*. IVP Academic, 2004.